



*Kantor Regional XII
Badan Kepegawaian negara*

STATISTIK DATA ASN

Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN

Periode Desember 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Buku Statistik Data ASN Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN periode Desember 2024 ini dapat diselesaikan guna pengembangan, pengelolaan, penyediaan data dan teknologi informasi serta penyelenggaraan sistem informasi untuk mendukung manajemen kepegawaian dalam menyelenggarakan fungsinya.

Sumber data dalam penyusunan Buku Statistik Data ASN Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN periode Desember 2024 ini berasal dari basis data pada aplikasi SIASN yang dimiliki BKN dimana penyajian datanya diambil dalam satuan tingkat wilayah Kantor Regional XII BKN dengan rincian berdasarkan masing – masing daerah kabupaten / kota pada tiga Provinsi yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberikan kontribusi baik data dan informasi maupun saran dan arahan yang positif dalam penyusunan buku ini. Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya dalam penyusunan buku ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, diharapkan saran dan kritik yang dapat meningkatkan kualitas data dan informasi dari buku statistik ini. Kami berharap Buku Statistik Data ASN Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN periode Desember 2024 ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak terkait yang membutuhkan.



Anna Hasnah Hasaruddin, SE, MM
Kepala Kantor Regional XII BKN



DAFTAR ISI



Jumlah ASN Aktif

Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN

1

Jumlah PNS Daerah

2

Jumlah PPPK Daerah

3



DAFTAR TABEL

Halaman

1. Jumlah ASN Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin	
a. Wilayah Provinsi Riau	9
b. Wilayah Provinsi Sumatera Barat	9
c. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	10
2. Jumlah PNS Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan	
a. Wilayah Provinsi Riau	10
b. Wilayah Provinsi Sumatera Barat	11
c. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	12
3. Jumlah PPPK Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan	
a. Wilayah Provinsi Riau	12
b. Wilayah Provinsi Sumatera Barat	13
c. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	14
4. Jumlah PNS Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan	
a. Wilayah Provinsi Riau	15
b. Wilayah Provinsi Sumatera Barat	15
c. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	16
5. Jumlah PNS Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia	
a. Wilayah Provinsi Riau	17
b. Wilayah Provinsi Sumatera Barat	17
c. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	18

DAFTAR TABEL

Halaman

6. Jumlah PPPK Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia	
a. Wilayah Provinsi Riau	19
b. Wilayah Provinsi Sumatera Barat	20
c. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	21
7. Jumlah PNS Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan	
a. Wilayah Provinsi Riau	22
b. Wilayah Provinsi Sumatera Barat	23
c. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	26
8. Jumlah PPPK Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan	
a. Wilayah Provinsi Riau	27
b. Wilayah Provinsi Sumatera Barat	29
c. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	31
9. Jumlah PNS Jabatan Fungsional Tertentu	33
10. Jumlah PPPK Jabatan Fungsional Tertentu	34
11. Jumlah PNS Jabatan Fungsional Tertentu Tenaga Kesehatan	35

JUMLAH ASN AKTIF

WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL XII BKN

295.604 Orang

Jumlah ASN Periode Desember 2024

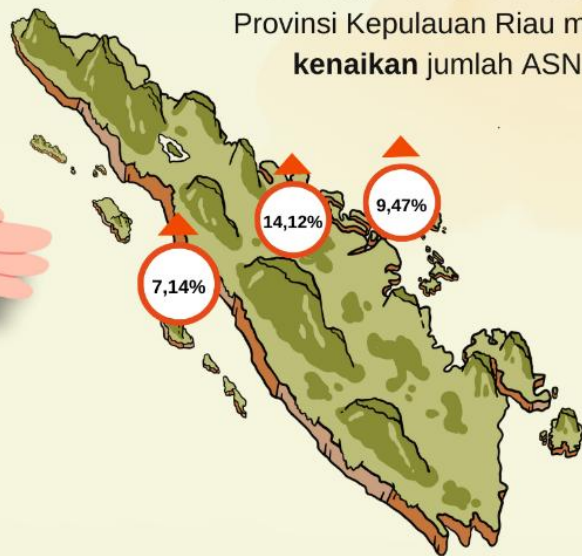
Jumlah ASN aktif yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Regional XII BKN yang terdiri dari PNS dan PPPK baik dari Instansi Pusat maupun Instansi Daerah.

Tren Pertumbuhan Jumlah ASN 2019 - 2024



Pertumbuhan Jumlah ASN Masing - Masing Daerah

Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan jumlah ASN Aktif



Jumlah Jenis ASN pada wilayah kerja Kantor Regional XII BKN

9,8%
28.925

PNS Pusat : PNS yang bekerja pada instansi vertikal di wilayah kerja Kantor regional XII BKN

62,7%
185.412

PNS Daerah : PNS yang bekerja pada instansi daerah di wilayah kerja Kantor regional XII BKN

0,4%
1.302

PPPK Pusat : PPPK yang bekerja pada instansi vertikal di wilayah kerja Kantor regional XII BKN

27,1%
79.965

PPPK Daerah : PPPK yang bekerja pada instansi daerah di wilayah kerja Kantor regional XII BKN

Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif merujuk pada ASN yang saat ini masih aktif bekerja dan sedang menjalankan tugas dalam suatu instansi pemerintahan. Secara singkat, ASN aktif adalah pegawai negeri yang belum pensiun atau berhenti bekerja dari instansi pemerintah, dan mereka tetap menjalankan tugas serta memiliki kewajiban sesuai dengan jabatan mereka. ASN aktif ini terdiri dari dua jenis pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang status kepegawaiannya masih aktif dan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi tempat mereka bekerja di lingkungan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga 2024 jumlah ASN pada wilayah kerja Kantor Regional XII BKN terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari kebutuhan layanan publik yang semakin kompleks, mutasi pegawai, penerimaan calon aparatur negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, hingga kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hingga akhir tahun 2024, terdapat jumlah kenaikan ASN berdasarkan wilayah kerja Kantor Regional XII BKN adalah Provinsi Riau, sebesar 14,12%, diikuti Provinsi Kepulauan Riau sebesar 9,47% dan Provinsi Sumatera Barat sebesar 7,14% dari Periode Juni 2024.

Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan ASN:

1. **Kebijakan Pemerintah:** Program reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran memengaruhi jumlah rekrutmen ASN.
2. **Kebutuhan Layanan Publik:** Sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tetap membutuhkan penambahan ASN.
3. **Pensiun Massal:** Gelombang pensiun ASN (khususnya generasi baby boomer) membuka lowongan untuk rekrutmen baru.
4. **Digitalisasi:** Transformasi digital mengurangi kebutuhan ASN di bidang administrasi, tetapi meningkatkan kebutuhan tenaga ahli IT.
5. **Mutasi:** Perpindahan PNS dari satu Instansi ke Instansi lainnya.

Pada periode Desember 2024, jumlah ASN aktif di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN adalah 295.604. Angka ini mencakup PNS yang bekerja pada instansi pusat dan daerah, maupun PPPK yang bekerja pada instansi pusat dan daerah. Adapun jumlahnya antara lain PNS Pusat sebanyak 28.925 orang (9,78%), PNS Daerah 185.412 (62,72%), PPPK Pusat 1.302 (0,44%), dan PPPK Daerah 79.965 orang (27,05%).

JUMLAH PNS DAERAH

JUMLAH PNS DAERAH PER INSTANSI



Jumlah PNS daerah per 31 Desember 2024

185.412 Orang

Jumlah PNS turun sebesar 5,02 %
(9.804 orang) dari jumlah PNS
periode Desember 2023

- Jumlah PNS paling banyak : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (15.552 orang)
- Jumlah PNS paling sedikit : Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas (1.731 orang)

BERDASARKAN JENIS KELAMIN



Jumlah PNS Pria
(66.942 orang)
36.1%

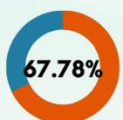


Jumlah PNS Wanita
(118.470 orang)
63.9%

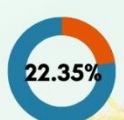
BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN



K. Jabatan Struktural
(18.310 orang)



K. Jabatan Fungsional
(125.667 orang)



K. Jabatan Pelaksana
(41.435 orang)

Kelompok jabatan fungsional mendominasi pada jumlah kelompok jabatan

BERDASARKAN KELOMPOK USIA

Kelompok Umur
17 - 20 tahun
0 orang



Kelompok Umur
≥ 61 tahun
183 orang

Kelompok Umur
21 - 40 tahun
50.807 orang

Kelompok Umur
41 - 60 tahun
134.422 orang

Kelompok usia 41 - 60 Tahun mendominasi pada jumlah kelompok usia

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



Tingkat pendidikan D IV / S I mendominasi pada jumlah tingkat pendidikan

19.537 orang

SD - SMA

23.766 orang

D I - III

122.028 orang

D IV / S I

19.864 orang

S 2

217 orang

S 3

PNS daerah adalah pegawai yang diangkat sebagai aparatur sipil negara secara permanen setelah lulus seleksi dan memenuhi syarat yang bekerja di instansi pemerintah daerah, yaitu di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Jumlah PNS Daerah cenderung stabil atau sedikit menurun di tahun 2024 karena adanya peningkatan jumlah pensiun dan Rekrutmen PNS baru yang dilakukan secara terbatas, dengan fokus pada sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Jumlah PNS Daerah Pada Desember 2024 sebesar 185.412, terjadi penurunan sebesar 5,02% dari periode Desember 2023. Penurunan jumlah PNS tersebut terjadi di tiga propinsi wilayah kerja Kantor Regional XII BKN, Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,76%, diikuti Provinsi Riau sebesar 4,87% dan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,10%.

Provinsi Sumatera Barat tercatat memiliki jumlah PNS terbanyak yakni 84.224 orang dibanding Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Dominasi Sumatera Barat dalam jumlah PNS ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kebutuhan administrasi pemerintahan yang lebih besar karena Sumatera Barat memiliki struktur pemerintahan yang kompleks, dengan banyak kabupaten dan kota yang membutuhkan tenaga PNS untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Jumlah PNS Daerah dalam angka dapat dilihat berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

1. Berdasarkan Kelompok Jabatan

Berdasarkan Kelompok Jabatannya PNS dibagi menjadi 3 kelompok yaitu jabatan struktural, fungsional dan pelaksana. Jabatan fungsional merupakan kelompok terbesar dalam struktur PNS dengan jumlah sekitar 67.78% dari total PNS Daerah di Wilayah Kantor Regional XII BKN. PNS dalam jabatan ini memiliki tugas spesifik sesuai dengan bidangnya, seperti guru, dokter, perawat, auditor, atau peneliti. Jabatan pelaksana menempati urutan kedua dengan jumlah sekitar 22.35% dari total PNS daerah di wilayah Kantor Regional XII BKN. PNS dalam kelompok ini biasanya tidak memiliki wewenang pengambilan keputusan strategis, tetapi berperan penting dalam implementasi program pemerintah. Dan yang menduduki urutan terakhir adalah kelompok dengan Jabatan struktural. Kelompok ini terdiri dari PNS yang menduduki posisi kepemimpinan dan manajerial, mulai dari eselon I hingga eselon IV.

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita di Indonesia telah melampaui jumlah PNS pria. Hal ini mencerminkan perubahan signifikan dalam partisipasi perempuan di sektor publik yang didorong oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah dan perubahan sosial. Dominasi PNS wanita ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di berbagai daerah, termasuk di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN. PNS wanita yang ada di wilayah kerja Kantor Regional XII sebesar 63.9% dari Total PNS daerah.

3. Berdasarkan Kelompok Usia

PNS dalam rentang usia 41-60 tahun saat ini mendominasi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Wilayah Kantor Regional XII BKN sebesar 134.422, disusul kelompok umur 21-40 tahun sebanyak 50.807 PNS dan terakhir kelompok umur diatas 61 tahun hanya sebesar 183 PNS. Dominasi kelompok usia 41-60 tahun dipengaruhi oleh sistem rekrutmen PNS di masa lalu, di mana rekrutmen dalam jumlah yang besar sering dilakukan beberapa dekade yang lalu. Seiring berjalannya waktu, PNS yang direkrut pada era tersebut kini telah memasuki usia paruh baya atau mendekati masa pensiun. Dengan demikian, dominasi PNS kelompok usia 41-60 tahun mencerminkan kematangan birokrasi Indonesia, tetapi juga menuntut kesiapan dalam menghadapi tantangan regenerasi dan transformasi ke depan.

4. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan PNS (Pegawai Negeri Sipil) terdiri dari beberapa jenjang, mulai dari pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Dilihat dari tingkat pendidikannya, jumlah PNS daerah didominasi oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan gelar sarjana (D-IV/S-1) yaitu sekitar 122.028 PNS. Hal ini disebabkan oleh persyaratan kualifikasi pendidikan yang semakin meningkat untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam birokrasi. Pendidikan Diploma (D1, D2, dan D3) beradada di posisi kedua dengan jumlah PNS terbanyak yaitu sebesar 23.766 PNS. PNS dengan latar belakang pendidikan diploma ini biasanya menduduki posisi-posisi teknis dan pelaksana yang membutuhkan keterampilan praktis serta keahlian spesifik.

Tingkat Pendidikan yang menempati urutan terakhir dalam jumlah PNS di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah adalah pendidikan DOKTOR (S3). Jumlah PNS dengan gelar doktor relatif sangat sedikit dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Hal ini disebabkan oleh persyaratan pendidikan S3 yang tinggi, baik dari segi waktu, biaya, maupun kompleksitas studi, sehingga hanya sedikit orang yang menempuh jenjang ini.

JUMLAH PPPK DAERAH



Tren Kenaikan Jumlah PPPK Daerah



Pada tahun 2024, formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada wilayah kerja Kantor Regional XII BKN meningkat sebanyak 76,3% (34.608 orang). Ini dikarenakan adanya pengadaan formasi PPPK dengan tujuan untuk menyelesaikan penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja di sektor publik.

Jumlah PPPK Daerah per Instansi



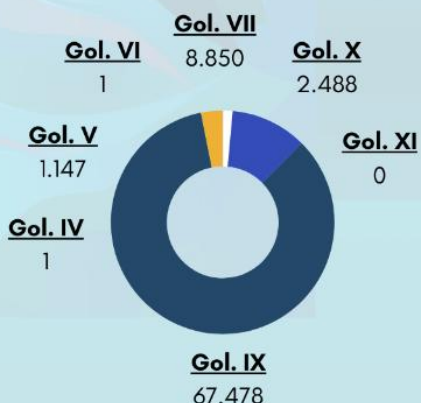
Jumlah PPPK daerah per 31 Desember 2024

79.965

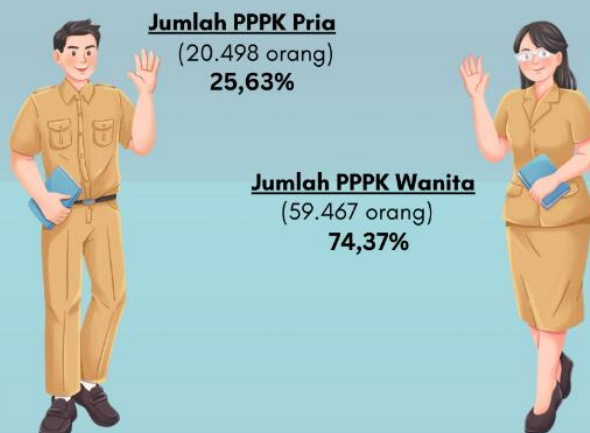
Orang

Jumlah PPPK paling banyak : Pemerintah Provinsi Riau (8.941 orang)
Jumlah PPPK paling sedikit : Pemerintah Kota Pariaman (147 orang)

Berdasarkan Tingkat Golongan



Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Kelompok Usia



Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Peningkatan jumlah PPPK daerah juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan teknis, yang selama ini mengalami kekurangan sumber daya manusia. Jumlah PPPK terus meningkat karena pemerintah aktif melakukan rekrutmen untuk mengisi kekurangan tenaga fungsional, terutama guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Pada Desember 2024, kenaikan jumlah PPPK adalah sebesar 76,3% dari periode Desember 2023. Berdasarkan wilayah kerja, Provinsi Riau terdapat 37.384 PPPK, diikuti Provinsi Sumatera Barat terdapat 31.143 PPPK, dan Provinsi Kepulauan Riau sebesar terdapat 11.438 PPPK. Sehingga Total PPPK daerah wilayah kerja Kantor Regional XII di tahun 2024 mencapai 79.965 PPPK.

Tren Kenaikan Jumlah PPPK Daerah (2021-2024) :

- **Tahun 2021:** Pada tahun ini, rekrutmen PPPK mulai digalakkan, terutama untuk mengisi kekurangan guru dan tenaga kesehatan. Jumlah PPPK daerah mulai menunjukkan peningkatan, meskipun belum signifikan yaitu sebesar 3.367.
- **Tahun 2022:** Jumlah PPPK daerah meningkat tajam (15.135) seiring dengan percepatan rekrutmen di berbagai sektor. Program rekrutmen guru PPPK menjadi salah satu pendorong utama peningkatan ini.
- **Tahun 2023:** Peningkatan jumlah PPPK daerah semakin signifikan yaitu menjadi 45.357 PPPK, dengan fokus pada sektor kesehatan dan teknis.
- **Tahun 2024:** Jumlah PPPK daerah kembali naik sebesar 76.3% sehingga jumlahnya menjadi 76.965 PPPK, ini dikarenakan penerimaan dalam skala besar di berbagai sektor.

Sama halnya dengan PNS Jumlah PPPK Daerah dalam angka juga dapat dilihat berdasarkan beberapa kriteria

1. Berdasarkan tingkat golongan

PPPK didominasi oleh Golongan IX dengan jumlah 67.467 orang, Hal ini menyesuaikan dengan tingkat pendidikan, sehingga urutan pendidikan PPPK dengan jumlah tertinggi adalah tingkat D-IV/S-1. Selanjutnya Golongan V, Golongan VI dan Golongan VII dengan total 10.000 orang, menyesuaikan dengan tingkat pendidikan terbesar kedua adalah tingkat DI-DIII. Selanjutnya Golongan X dengan jumlah 2.480 orang, menyesuaikan dengan tingkat pendidikan, sehingga pendidikan dengan jumlah terbesar ketiga adalah tingkat S-2. Dan Golongan XI dengan jumlah 18 orang, menyesuaikan dengan tingkat pendidikan, sehingga pendidikan dengan jumlah terbesar ketiga adalah tingkat S-3.

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

Sejalan dengan PNS, jumlah PPPK wanita juga melampaui jumlah PPPK pria. Jumlah PPPK Wanita adalah 59.467 orang atau 74,37% dari total PPPK Daerah dan Jumlah PPPK Pria adalah 20.498 orang atau 25,63% dari total PPPK Daerah
3. Berdasarkan Kelompok Usia

Berbeda dengan PNS, PPPK dalam rentang usia 21-40 tahun saat ini mendominasi jumlah PPPK di Wilayah Kantor Regional XII BKN. Dominasi ini mencerminkan struktur usia PPPK yang didominasi oleh generasi yang masih muda walaupun rentang usia untuk melamar PPPK lebih luas yakni dapat berumur lebih dari 35 tahun. Syarat pengalaman kerja adalah lebih dari 2 tahun dan menduduki posisi-posisi teknis dalam birokrasi. Dominasi kelompok usia ini menjadi masuk akal karena dalam menjalankan tugas, diperlukan tenaga kerja profesional yang fleksibel dan berorientasi pada kinerja untuk pemerintahan dan pelayanan publik. Dominasi kelompok usia ini juga dipengaruhi oleh sistem rekrutmen PPPK yang dimulai di masa kini yakni sejak tahun 2021. Sehingga, PPPK yang direkrut belum memasuki usia paruh baya ataupun mendekati masa pensiun. Hal ini menciptakan generasi baru dalam birokrasi, di mana sebagian besar PPPK berada dalam kelompok usia yang lebih muda daripada PNS. Selanjutnya, PPPK kelompok usia 41-60 mencerminkan pemerintah memenuhi janjinya, untuk mengangkat tenaga honorer yang telah mengabdikan dan, memiliki pengalaman kerja yang tidak kalah dibanding usia muda lainnya.
4. Berdasarkan Pendidikan

Sama halnya dengan jumlah PNS, Jumlah PPPK Daerah juga didominasi tingkat pendidikan D-IV/S-IV sebesar 67.470, diikuti pendidikan D-I-D-III (8.858), S2 (2.488), dan terakhir pendidikan SD-SMA (1.149). Sedangkan untuk pendidikan S.3 tidak terdapat PPPK daerah dengan pendidikan tsb.

TABEL PENYAJIAN DATA

1. Jumlah ASN Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin

a) Wilayah Provinsi Riau

INSTANSI	PNS			PPPK			TOTAL ASN
	PRIA	WANITA	JUMLAH	PRIA	WANITA	JUMLAH	
Pemerintah Provinsi Riau	5.739	7.678	13.417	2.928	6.013	8.941	22.358
Pemerintah Kab. Kampar	2.477	4.127	6.604	909	3.093	4.002	10.606
Pemerintah Kab. Bengkalis	2.149	3.823	5.972	907	2.629	3.536	9.508
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	1.784	2.930	4.714	544	1.911	2.455	7.169
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	2.473	3.750	6.223	506	1.624	2.130	8.353
Pemerintah Kab. Pelalawan	1.740	2.469	4.209	344	1.032	1.376	5.585
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	1.917	3.124	5.041	930	2.494	3.424	8.465
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	2.185	3.451	5.636	744	2.330	3.074	8.710
Pemerintah Kab. Siak	2.017	3.174	5.191	614	2.129	2.743	7.934
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	1.772	2.858	4.630	415	1.292	1.707	6.337
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	1.120	1.499	2.619	311	715	1.026	3.645
Pemerintah Kota Pekanbaru	1.847	4.167	6.014	305	1.084	1.389	7.403
Pemerintah Kota Dumai	1.199	2.512	3.711	259	1.322	1.581	5.292
TOTAL	28.419	45.562	73.981	9.716	27.668	37.384	111.365

b) Wilayah Provinsi Sumatera Barat

INSTANSI	PNS			PPPK			TOTAL ASN
	PRIA	WANITA	JUMLAH	PRIA	WANITA	JUMLAH	
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	5.456	10.096	15.552	1.222	3.256	4.478	20.030
Pemerintah Kab. Agam	1.315	3.703	5.018	445	2.053	2.498	7.516
Pemerintah Kab. Pasaman	1.180	2.332	3.512	439	1.590	2.029	5.541
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	1.576	3.905	5.481	382	1.270	1.652	7.133
Pemerintah Kab. Solok	1.371	3.129	4.500	179	796	975	5.475
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	1.270	3.682	4.952	500	1.343	1.843	6.795
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	1.627	3.638	5.265	747	2.969	3.716	8.981
Pemerintah Kab. Tanah Datar	1.160	3.046	4.206	359	1.280	1.639	5.845
Pemerintah Kab. Sijunjung	1.019	2.170	3.189	276	1.261	1.537	4.726
Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai	1.114	1.240	2.354	333	683	1.016	3.370
Pemerintah Kab. Solok Selatan	946	2.213	3.159	78	208	286	3.445
Pemerintah Kab. Dharmasraya	917	2.083	3.000	306	1.283	1.589	4.589
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	1.263	2.983	4.246	329	1.488	1.817	6.063
Pemerintah Kota Bukittinggi	779	1.477	2.256	147	361	508	2.764
Pemerintah Kota Padang Panjang	659	1.122	1.781	83	179	262	2.043
Pemerintah Kota Sawahlunto	617	1.269	1.886	212	595	807	2.693

INSTANSI	PNS			PPPK			TOTAL ASN
	PRIA	WANITA	JUMLAH	PRIA	WANITA	JUMLAH	
Pemerintah Kota Solok	656	1.213	1.869	79	255	334	2.203
Pemerintah Kota Padang	2.010	5.071	7.081	665	2.693	3.358	10.439
Pemerintah Kota Payakumbuh	799	1.729	2.528	171	481	652	3.180
Pemerintah Kota Pariaman	764	1.625	2.389	34	113	147	2.536
TOTAL	26.498	57.726	84.224	6.986	24.157	31.143	115.367

c) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

INSTANSI	PNS			PPPK			TOTAL ASN
	PRIA	WANITA	JUMLAH	PRIA	WANITA	JUMLAH	
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2.242	2.574	4.816	835	1.325	2.160	6.976
Pemerintah Kab. Bintan	1.377	1.791	3.168	194	600	794	3.962
Pemerintah Kab. Karimun	1.558	2.085	3.643	498	929	1.427	5.070
Pemerintah Kab. Natuna	1.483	1.335	2.818	275	631	906	3.724
Pemerintah Kab. Lingga	1.183	1.461	2.644	170	434	604	3.248
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	821	910	1.731	221	452	673	2.404
Pemerintah Kota Batam	2.215	3.263	5.478	1.289	2.591	3.880	9.358
Pemerintah Kota Tanjungpinang	1.146	1.763	2.909	314	680	994	3.903
TOTAL	12.025	15.182	27.207	3.796	7.642	11.438	38.645

2. Jumlah PNS Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

a) Wilayah Provinsi Riau

INSTANSI	Gol.I		Gol.II		Gol.III		Gol.IV	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Riau	20	2	625	380	3.478	4.739	1.616	2.557
Pemerintah Kab. Kampar	18	2	289	153	1.405	2.634	765	1.338
Pemerintah Kab. Bengkalis	16	1	433	307	1.334	2.856	366	659
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	9	2	347	252	1.130	2.137	298	539
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	21	2	427	261	1.472	2.508	553	979
Pemerintah Kab. Pelalawan	10	1	240	128	1.098	1.793	392	547
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	10	1	347	306	1.171	2.294	389	523
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	18	3	523	405	1.324	2.604	320	439
Pemerintah Kab. Siak	22	1	360	195	1.268	2.418	367	560
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	12	2	247	255	1.008	1.745	505	856
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	7	0	192	261	782	1.101	139	137

INSTANSI	Gol.I		Gol.II		Gol.III		Gol.IV	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Kota Pekanbaru	8	1	258	199	1.259	2.843	322	1.124
Pemerintah Kota Dumai	8	0	146	197	828	1.924	217	391
TOTAL	179	18	4.434	3.299	17.557	31.596	6.249	10.649

b) Wilayah Provinsi Sumatera Barat

INSTANSI	Gol.I		Gol.II		Gol.III		Gol.IV	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	30	3	619	600	3.188	5.903	1.619	3.590
Pemerintah Kab. Agam	20	1	218	213	719	2.323	358	1.166
Pemerintah Kab. Pasaman	19	0	159	203	638	1.439	364	690
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	13	0	211	329	964	2.765	388	811
Pemerintah Kab. Solok	9	0	177	236	814	2.176	371	717
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	16	1	176	423	672	1.972	406	1.286
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	8	1	178	294	869	2.100	572	1.243
Pemerintah Kab. Tanah Datar	10	3	144	236	697	1.991	309	816
Pemerintah Kab. Sijunjung	4	0	143	103	691	1.725	181	342
Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	11	0	252	164	685	957	166	119
Pemerintah Kab. Solok Selatan	3	1	126	304	646	1.633	171	275
Pemerintah Kab. Dharmasraya	8	0	111	149	569	1.582	229	352
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	2	1	137	189	774	2.184	350	609
Pemerintah Kota Bukittinggi	16	1	154	145	482	1.021	127	310
Pemerintah Kota Padang Panjang	6	1	101	95	444	853	108	173
Pemerintah Kota Sawahlunto	0	0	91	121	404	918	122	230
Pemerintah Kota Solok	3	0	70	63	446	848	137	302
Pemerintah Kota Padang	43	0	391	371	1.233	3.287	343	1.413
Pemerintah Kota Payakumbuh	6	0	140	91	480	1.271	173	367
Pemerintah Kota Pariaman	3	0	119	255	506	1.043	136	327
TOTAL	230	13	3.717	4.584	15.921	37.991	6.630	15.138

c) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

INSTANSI	Gol.I		Gol.II		Gol.III		Gol.IV	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	6	0	221	140	1.580	2.056	435	378
Pemerintah Kab. Bintan	6	0	274	256	907	1.282	190	253
Pemerintah Kab. Karimun	21	4	365	268	938	1.592	234	221
Pemerintah Kab. Natuna	12	0	257	162	1.035	1.092	179	81
Pemerintah Kab. Lingga	6	1	172	179	834	1.154	171	127
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	3	0	136	188	597	684	85	38
Pemerintah Kota Batam	14	0	311	252	1.591	2.475	299	536
Pemerintah Kota Tanjungpinang	2	0	163	145	831	1.316	150	302
TOTAL	70	5	1.899	1.590	8.313	11.651	1.743	1.936

3. Jumlah PPPK Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

a) Wilayah Provinsi Riau

INSTANSI	Gol.V		Gol.VI		Gol.VII		Gol.IX		Gol.X		Gol.XI	
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
Pemerintah Provinsi Riau	20	9	0	0	39	142	2.828	5.751	41	110	0	1
Pemerintah Kab. Kampar	39	5	0	0	19	96	842	2.955	9	36	0	1
Pemerintah Kab. Bengkalis	44	2	0	0	96	367	709	2.109	52	151	6	0
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	6	1	0	0	44	168	483	1.702	11	40	0	0
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	6	0	0	0	9	18	485	1.587	4	18	2	1
Pemerintah Kab. Pelalawan	0	0	0	0	4	33	332	969	8	30	0	0
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	74	17	0	0	82	348	737	2.044	36	85	1	0
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	39	4	0	0	70	410	591	1.795	44	121	0	0
Pemerintah Kab. Siak	6	0	0	0	58	478	514	1.554	36	97	0	0
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	13	4	0	0	17	137	378	1.122	6	29	1	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	0	0	0	0	34	202	267	473	10	40	0	0
Pemerintah Kota Pekanbaru	13	1	0	0	8	36	278	1.038	6	9	0	0
Pemerintah Kota Dumai	2	0	0	0	49	382	188	884	19	56	1	0
TOTAL	262	43	0	0	529	2.817	8.632	23.983	282	822	11	3

b) Wilayah Provinsi Sumatera Barat

INSTANSI	Gol.V		Gol.VI		Gol.VII		Gol.IX		Gol.X		Gol.XI	
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	14	6	0	0	69	261	1.105	2.926	34	63	0	0
Pemerintah Kab. Agam	18	4	0	0	48	261	364	1.737	14	51	1	0
Pemerintah Kab. Pasaman	10	2	0	0	54	287	354	1.240	21	60	0	1
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	75	14	0	0	24	89	282	1.161	1	6	0	0
Pemerintah Kab. Solok	10	12	1	0	3	4	165	780	0	0	0	0
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	67	7	0	0	22	78	410	1.251	1	7	0	0
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	22	12	0	0	66	462	632	2.370	27	125	0	0
Pemerintah Kab. Tanah Datar	33	6	0	0	31	169	286	1.086	9	19	0	0
Pemerintah Kab. Sijunjung	8	1	0	0	34	244	222	962	12	54	0	0
Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	0	0	0	0	70	261	252	392	11	30	0	0
Pemerintah Kab. Solok Selatan	10	1	0	0	2	1	66	206	0	0	0	0
Pemerintah Kab. Dharmasraya	29	2	0	0	35	259	218	914	24	108	0	0
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	7	3	0	0	15	148	294	1.267	13	70	0	0
Pemerintah Kota Bukittinggi	34	5	0	0	18	72	86	247	9	37	0	0
Pemerintah Kota Padang Panjang	27	3	0	0	20	76	30	85	6	15	0	0
Pemerintah Kota Sawahlunto	59	8	0	0	39	194	109	351	5	42	0	0
Pemerintah Kota Solok	0	0	0	0	9	57	68	187	2	11	0	0
Pemerintah Kota Padang	10	2	0	0	55	296	590	2.333	10	62	0	0
Pemerintah Kota Payakumbuh	14	4	0	0	54	94	89	349	14	34	0	0
Pemerintah Kota Pariaman	1	2	0	0	1	0	32	111	0	0	0	0
TOTAL	448	94	1	0	669	3.313	5.654	19.955	213	794	1	1

c) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

INSTANSI	Gol.V		Gol.VI		Gol.VII		Gol.IX		Gol.X		Gol.XI	
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	0	0	0	0	14	40	814	1.263	7	21	0	1
Pemerintah Kab. Bintan	21	3	0	0	23	123	143	452	7	22	0	0
Pemerintah Kab. Karimun	34	5	0	0	25	63	435	847	4	14	0	0
Pemerintah Kab. Natuna	25	7	0	0	50	216	177	370	23	38	0	0
Pemerintah Kab. Lingga	14	0	0	0	36	172	107	243	13	19	0	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	39	5	0	0	12	91	163	347	7	9	0	0
Pemerintah Kota Batam	66	6	0	0	105	408	1.078	2.078	40	98	0	1
Pemerintah Kota Tanjungpinang	62	14	0	0	35	110	212	514	5	42	0	0
TOTAL	261	40	0	0	300	1.223	3.129	6.114	106	263	0	2

4. Jumlah PNS Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan

a) Wilayah Provinsi Riau

INSTANSI	STRUKTURAL		FUNGSIONAL		PELAKSANA	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Riau	489	190	2.797	5.452	2.453	2.036
Pemerintah Kab. Kampar	297	111	1.469	3.595	711	421
Pemerintah Kab. Bengkalis	426	218	863	2.952	860	653
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	296	186	776	2.097	712	647
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	457	200	1.237	2.966	779	584
Pemerintah Kab. Pelalawan	319	153	887	1.945	534	371
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	285	142	999	2.455	633	527
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	331	168	1.022	2.699	832	584
Pemerintah Kab. Siak	347	139	846	2.366	824	669
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	251	117	1.002	2.296	519	445
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	247	93	475	1.061	398	345
Pemerintah Kota Pekanbaru	467	323	672	3.230	708	614
Pemerintah Kota Dumai	342	231	478	1.931	379	350
TOTAL	4.554	2.271	13.523	35.045	10.342	8.246

b) Wilayah Provinsi Sumatera Barat

INSTANSI	STRUKTURAL		FUNGSIONAL		PELAKSANA	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	522	304	3.207	8.143	1.727	1.649
Pemerintah Kab. Agam	211	136	707	3.267	397	300
Pemerintah Kab. Pasaman	203	133	584	1.897	393	302
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	240	169	911	3.419	425	317
Pemerintah Kab. Solok	221	141	818	2.774	332	214
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	230	169	726	3.290	314	223
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	217	184	1.000	3.115	410	339
Pemerintah Kab. Tanah Datar	208	157	630	2.549	322	340
Pemerintah Kab. Sijunjung	200	147	524	1.817	295	206
Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai	171	90	480	828	463	322
Pemerintah Kab. Solok Selatan	136	82	486	1.707	324	424
Pemerintah Kab. Dharmasraya	158	109	549	1.792	210	182
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	240	172	687	2.506	336	305
Pemerintah Kota Bukittinggi	200	191	201	951	378	335
Pemerintah Kota Padang Panjang	147	92	228	804	284	226
Pemerintah Kota Sawahlunto	163	129	253	918	201	222
Pemerintah Kota Solok	161	133	252	838	243	242
Pemerintah Kota Padang	480	422	783	4.078	747	571
Pemerintah Kota Payakumbuh	242	229	312	1.254	245	246
Pemerintah Kota Pariaman	155	101	346	1.192	263	332
TOTAL	4.505	3.290	13.684	47.139	8.309	7.297

c) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

INSTANSI	STRUKTURAL		FUNGSIONAL		PELAKSANA	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	340	141	1.242	1.797	660	636
Pemerintah Kab. Bintan	292	173	617	1.256	468	362
Pemerintah Kab. Karimun	346	181	697	1.501	515	403
Pemerintah Kab. Natuna	311	110	651	917	521	308
Pemerintah Kab. Lingga	237	96	580	1.081	366	284
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	213	89	360	614	248	207
Pemerintah Kota Batam	497	282	973	2.346	745	635
Pemerintah Kota Tanjungpinang	230	152	489	1.155	427	456
TOTAL	2.466	1.224	5.609	10.667	3.950	3.291

5. Jumlah PNS Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

a) Wilayah Provinsi Riau

INSTANSI	USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Riau	185	277	829	1.363	2.590	3.611	2.112	2.418	23	9
Pemerintah Kab. Kampar	36	52	206	691	897	1.654	1.334	1.725	4	5
Pemerintah Kab. Bengkalis	70	90	368	788	1.023	1.717	686	1.226	2	2
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	66	115	351	749	743	1.216	623	850	1	0
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	59	182	457	895	929	1.296	1.024	1.368	4	9
Pemerintah Kab. Pelalawan	47	69	303	655	828	1.139	561	606	1	0
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	62	165	241	644	916	1.539	697	776	1	0
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	52	99	432	795	1.096	1.813	604	743	1	1
Pemerintah Kab. Siak	48	94	334	782	993	1.430	641	867	1	1
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	68	183	356	757	607	1.006	739	899	2	13
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	36	46	302	586	497	585	285	282	0	0
Pemerintah Kota Pekanbaru	84	188	452	1.104	829	1.512	480	1.358	2	5
Pemerintah Kota Dumai	46	132	260	690	631	1.109	261	579	1	2
TOTAL	859	1.692	4.891	10.499	12.579	19.627	10.047	13.697	43	47

b) Wilayah Provinsi Sumatera Barat

INSTANSI	USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	224	581	1.039	2.064	1.942	3.877	2.237	3.565	14	9
Pemerintah Kab. Agam	60	200	206	771	407	1.031	642	1.701	0	0
Pemerintah Kab. Pasaman	24	59	184	576	410	861	562	835	0	1

INSTANSI	USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	132	363	252	1.002	442	1.007	750	1.527	0	6
Pemerintah Kab. Solok	59	167	211	645	396	1.031	704	1.280	1	6
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	40	109	223	827	342	968	659	1.768	6	10
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	47	117	250	781	460	1.053	870	1.686	0	1
Pemerintah Kab. Tanah Datar	60	151	228	630	335	931	537	1.334	0	0
Pemerintah Kab. Sijunjung	30	94	188	668	391	773	410	635	0	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai	61	88	284	433	468	507	300	212	1	0
Pemerintah Kab. Solok Selatan	52	133	253	745	371	822	270	513	0	0
Pemerintah Kab. Dharmasraya	35	90	191	641	364	778	327	574	0	0
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	75	224	267	895	450	1.037	470	827	1	0
Pemerintah Kota Bukittinggi	37	111	158	436	357	561	226	369	1	0
Pemerintah Kota Padang Panjang	37	72	134	306	301	459	187	285	0	0
Pemerintah Kota Sawahlunto	32	87	121	378	250	451	214	353	0	0
Pemerintah Kota Solok	28	65	161	355	303	469	164	320	0	4
Pemerintah Kota Padang	102	295	421	1.167	659	1.492	825	2.111	3	6
Pemerintah Kota Payakumbuh	18	36	146	483	369	697	265	510	1	3
Pemerintah Kota Pariaman	82	234	206	546	317	516	159	327	0	2
TOTAL	1.235	3.276	5.123	14.349	9.334	19.321	10.778	20.732	28	48

c) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

INSTANSI	USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	70	90	501	722	1.140	1.234	525	527	6	1
Pemerintah Kab. Bintan	101	206	275	493	587	633	413	459	1	0
Pemerintah Kab. Karimun	78	175	272	507	734	916	474	487	0	0
Pemerintah Kab. Natuna	71	133	306	439	720	552	386	211	0	0
Pemerintah Kab. Lingga	83	136	391	558	442	508	267	259	0	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	73	121	319	443	294	252	133	94	2	0
Pemerintah Kota Batam	113	220	297	757	1.079	1.345	723	939	3	2
Pemerintah Kota Tanjungpinang	64	103	262	504	577	720	242	435	1	1
TOTAL	653	1.184	2.623	4.423	5.573	6.160	3.163	3.411	13	4

6. Jumlah PPPK Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

a) Wilayah Provinsi Riau

INSTANSI	USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Riau	574	1.476	1.531	3.018	646	1.264	177	253	0	2
Pemerintah Kab. Kampar	158	509	468	1.550	233	865	50	169	0	0
Pemerintah Kab. Bengkalis	148	447	477	1.304	246	743	35	132	1	3
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	77	418	301	1.037	137	401	29	55	0	0
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	47	198	277	876	150	474	32	76	0	0
Pemerintah Kab. Pelalawan	26	111	216	588	88	282	14	51	0	0
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	131	428	520	1.380	245	616	34	70	0	0
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	96	350	377	1.308	210	530	60	142	1	0

INSTANSI	USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Kab. Siak	92	351	319	1.123	163	523	40	132	0	0
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	58	201	213	698	113	329	31	64	0	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	35	132	198	431	68	141	10	11	0	0
Pemerintah Kota Pekanbaru	46	182	121	368	112	421	26	113	0	0
Pemerintah Kota Dumai	49	326	129	675	60	265	20	55	1	1
TOTAL	1.537	5.129	5.147	14.356	2.471	6.854	558	1.323	3	6

b) Wilayah Provinsi Sumatera Barat

INSTANSI	USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	201	576	756	1.856	197	647	68	177	0	0
Pemerintah Kab. Agam	150	613	214	1.013	67	368	14	59	0	0
Pemerintah Kab. Pasaman	74	281	271	979	83	312	11	17	0	1
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	112	252	192	708	63	278	14	32	1	0
Pemerintah Kab. Solok	11	46	87	362	61	345	19	43	1	0
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	103	302	297	733	83	248	17	60	0	0
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	164	882	442	1.501	92	454	49	132	0	0
Pemerintah Kab. Tanah Datar	137	418	170	580	38	239	14	43	0	0
Pemerintah Kab. Sijunjung	55	242	160	728	52	259	9	32	0	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai	36	138	240	445	53	93	4	7	0	0
Pemerintah Kab. Solok Selatan	8	10	31	86	26	94	13	18	0	0
Pemerintah Kab. Dharmasraya	68	306	183	711	49	226	6	40	0	0
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	40	229	180	805	82	405	26	49	1	0

INSTANSI	USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Kota Bukittinggi	30	123	86	174	24	57	7	7	0	0
Pemerintah Kota Padang Panjang	20	43	47	106	13	29	3	1	0	0
Pemerintah Kota Sawahlunto	48	130	114	353	45	100	5	12	0	0
Pemerintah Kota Solok	17	48	54	162	8	39	0	6	0	0
Pemerintah Kota Padang	199	667	322	1.313	119	525	25	188	0	0
Pemerintah Kota Payakumbuh	45	139	100	240	17	89	8	13	1	0
Pemerintah Kota Pariaman	6	40	18	47	5	22	5	4	0	0
TOTAL	1.524	5.485	3.964	12.902	1.177	4.829	317	940	4	1

c) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

INSTANSI	USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	195	382	417	618	161	240	62	85	0	0
Pemerintah Kab. Bintan	48	159	102	265	36	143	8	33	0	0
Pemerintah Kab. Karimun	72	171	305	475	102	238	19	44	0	1
Pemerintah Kab. Natuna	42	151	175	315	52	136	6	28	0	1
Pemerintah Kab. Lingga	45	155	82	222	40	49	3	8	0	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	48	107	134	262	36	77	3	6	0	0
Pemerintah Kota Batam	190	439	760	1.321	273	648	66	183	0	0
Pemerintah Kota Tanjungpinang	77	181	171	334	58	148	8	17	0	0
TOTAL	717	1.745	2.146	3.812	758	1.679	175	404	0	2

7. Jumlah PNS Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan

a) Wilayah Provinsi Riau

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Provinsi Riau	15	2	24	3	866	435	7	7	11	8	222	524	139	125	3.080	5.213	1.334	1.346	41	15
Pemerintah Kab. Kampar	10	1	24	9	429	202	1	9	74	85	109	510	30	158	1.481	2.860	316	293	3	0
Pemerintah Kab. Bengkalis	8	0	15	2	557	373	3	7	38	65	126	371	34	92	1.037	2.585	329	326	2	2
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	7	2	24	2	388	201	2	8	54	87	119	517	14	42	1.027	1.905	148	166	1	0
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	28	1	30	3	527	187	3	5	89	116	135	433	28	93	1.364	2.702	266	210	3	0
Pemerintah Kab. Pelalawan	6	0	3	1	298	121	1	3	54	52	58	277	16	104	1.108	1.740	196	171	0	0
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	7	0	10	2	422	273	0	2	44	63	88	357	20	22	1.111	2.256	215	149	0	0
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	10	2	25	5	549	276	3	2	59	55	102	376	10	53	1.188	2.386	239	296	0	0

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Kab. Siak	14	1	24	3	425	194	0	3	43	54	91	460	22	70	1.144	2.197	248	192	6	0
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	12	1	13	1	303	206	1	5	47	109	141	397	23	210	1.068	1.782	160	147	4	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	4	0	5	2	184	138	0	3	60	56	81	235	16	45	658	938	111	82	1	0
Pemerintah Kota Pekanbaru	8	2	15	2	337	205	1	5	21	63	96	477	73	92	934	2.859	350	458	12	4
Pemerintah Kota Dumai	4	0	5	0	240	167	2	0	8	13	83	357	28	97	589	1.617	239	260	1	1
TOTAL	133	12	217	35	5.525	2.978	24	59	602	826	1.451	5.291	453	1.203	15.789	31.040	4.151	4.096	74	22

b) Wilayah Provinsi Sumatera Barat

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	24	3	50	8	773	430	8	9	6	14	313	879	98	133	3.102	6.983	1.063	1.623	19	14
Pemerintah Kab. Agam	13	0	48	5	226	131	0	5	24	26	81	512	37	111	742	2.662	143	251	1	0

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Kab. Pasaman	6	0	20	0	231	125	0	0	19	17	58	328	23	111	703	1.644	120	107	0	0
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	7	13	35	4	251	147	0	0	46	84	99	554	38	143	962	2.753	137	206	1	1
Pemerintah Kab. Solok	3	3	22	1	210	92	1	12	38	57	77	419	26	101	812	2.266	180	177	2	1
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	4	3	27	4	189	105	3	14	24	74	71	603	18	103	739	2.552	192	223	3	1
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	1	1	19	3	251	174	1	6	30	55	76	602	24	97	983	2.453	242	247	0	0
Pemerintah Kab. Tanah Datar	13	5	19	6	157	101	0	2	22	26	105	538	29	97	695	2.120	120	151	0	0
Pemerintah Kab. Sijunjung	4	0	14	0	201	83	0	5	14	44	50	246	38	128	577	1.498	120	166	1	0
Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	6	0	12	0	260	130	0	2	16	14	96	234	19	11	583	749	122	100	0	0
Pemerintah Kab. Solok Selatan	2	0	1	1	118	120	1	3	15	23	82	352	15	53	609	1.554	101	107	2	0
Pemerintah Kab. Dharmasraya	7	3	5	0	111	74	2	4	23	24	77	373	16	71	524	1.374	151	160	1	0

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	1	1	5	1	152	88	1	2	31	46	105	344	20	120	793	2.165	152	216	3	0
Pemerintah Kota Bukittinggi	34	2	14	0	178	61	1	1	6	6	60	279	29	25	332	911	125	192	0	0
Pemerintah Kota Padang Panjang	6	1	12	1	129	52	1	3	5	3	69	247	21	45	317	659	96	110	3	1
Pemerintah Kota Sawahlunto	3	1	2	3	128	75	3	1	3	8	51	215	19	47	322	766	85	153	1	0
Pemerintah Kota Solok	3	0	7	0	92	35	0	1	4	4	38	160	22	44	315	737	172	228	3	4
Pemerintah Kota Padang	35	1	38	2	454	206	1	4	15	44	129	844	39	118	998	3.261	298	588	3	3
Pemerintah Kota Payakumbuh	7	1	7	1	161	80	0	0	8	11	71	362	39	71	353	974	152	229	1	0
Pemerintah Kota Pariaman	2	1	2	1	92	44	1	2	6	15	85	341	22	65	436	1.020	117	135	1	1
TOTAL	181	39	359	41	4.364	2.353	24	76	355	595	1.793	8.432	592	1.694	14.897	39.101	3.888	5.369	45	26

c) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	7	1	4	0	222	98	2	2	3	3	136	239	60	63	1.375	1.804	403	361	30	3
Pemerintah Kab. Bintan	6	1	11	0	301	140	1	4	36	29	160	420	35	51	720	1.040	106	106	1	0
Pemerintah Kab. Karimun	9	2	27	9	371	185	2	4	62	47	156	387	38	50	693	1.273	195	127	5	1
Pemerintah Kab. Natuna	7	1	25	0	344	141	0	1	23	14	113	286	33	22	848	825	90	45	0	0
Pemerintah Kab. Lingga	5	0	5	1	144	70	1	0	28	48	141	356	10	13	803	942	46	31	0	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	2	0	6	0	124	65	0	1	20	25	74	232	29	20	502	529	62	38	2	0
Pemerintah Kota Batam	13	1	11	2	396	123	2	1	18	23	117	536	70	86	1.328	2.242	257	248	3	1
Pemerintah Kota Tanjungpinang	5	4	6	2	267	136	2	0	8	29	92	354	40	43	606	1.066	117	128	3	1
TOTAL	54	10	95	14	2.169	958	10	13	198	218	989	2.810	315	348	6.875	9.721	1.276	1.084	44	6

8. Jumlah PPPK Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan

a) Wilayah Provinsi Riau

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Provinsi Riau	0	0	0	0	20	9	0	0	0	0	40	147	28	48	2.798	5.704	42	105	0	0
Pemerintah Kab. Kampar	0	0	0	0	39	5	0	0	0	0	19	96	2	10	840	2.943	9	39	0	0
Pemerintah Kab. Bengkalis	0	0	0	0	44	2	0	0	0	0	96	367	12	21	699	2.089	56	150	0	0
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	0	0	1	0	5	2	0	0	0	0	44	168	1	4	482	1.697	11	40	0	0
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	9	18	1	7	484	1.579	6	20	0	0
Pemerintah Kab. Pelalawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	33	0	13	332	956	8	30	0	0
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	0	0	0	0	74	17	0	0	0	0	82	348	4	22	732	2.023	38	84	0	0
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	0	0	0	0	39	4	0	0	0	0	70	410	6	43	587	1.752	42	121	0	0
Pemerintah Kab. Siak	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	58	478	2	41	512	1.513	36	97	0	0

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	0	0	0	0	13	4	0	0	0	0	17	137	0	5	378	1.117	7	29	0	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	202	0	6	267	467	10	40	0	0
Pemerintah Kota Pekanbaru	0	0	0	0	13	1	0	0	0	0	8	36	3	10	275	1.029	6	8	0	0
Pemerintah Kota Dumai	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	49	382	3	21	183	861	22	58	0	0
TOTAL	0	0	1	0	261	44	0	0	0	0	530	2.822	62	251	8.569	23.730	293	821	0	0

b) Wilayah Provinsi Sumatera Barat

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	0	0	0	0	14	6	0	0	0	0	69	261	10	43	1.098	2.883	31	63	0	0
Pemerintah Kab. Agam	0	0	0	0	18	4	0	0	0	0	48	261	2	15	362	1.721	15	52	0	0
Pemerintah Kab. Pasaman	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	54	287	1	30	354	1.211	20	60	0	0
Pemerintah Kab.	0	0	0	0	75	14	0	0	0	0	24	89	2	3	280	1.160	1	4	0	0

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Limapuluh Kota																				
Pemerintah Kab. Solok	0	0	0	0	10	12	0	0	1	0	3	4	0	0	165	780	0	0	0	0
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	0	0	0	0	67	7	0	0	0	0	22	78	1	7	409	1.244	1	7	0	0
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	0	0	0	0	22	12	0	0	0	0	66	462	6	67	626	2.310	27	118	0	0
Pemerintah Kab. Tanah Datar	0	0	0	0	33	6	0	0	0	0	31	169	0	11	287	1.075	8	19	0	0
Pemerintah Kab. Sijunjung	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	34	244	0	14	221	946	13	56	0	0
Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	261	2	10	251	383	10	29	0	0
Pemerintah Kab. Solok Selatan	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	2	1	0	0	66	206	0	0	0	0
Pemerintah Kab. Dharmasraya	0	0	0	0	29	2	0	0	0	0	35	259	4	30	214	884	24	108	0	0
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	0	0	0	0	7	3	0	0	0	0	15	148	4	19	290	1.246	13	72	0	0

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Kota Bukittinggi	0	0	0	0	34	5	0	0	0	0	18	72	0	4	86	243	9	37	0	0
Pemerintah Kota Padang Panjang	0	0	0	0	27	3	0	0	0	0	20	76	0	1	30	83	6	16	0	0
Pemerintah Kota Sawahlunto	0	0	0	0	59	8	0	0	0	0	39	194	2	19	108	330	4	44	0	0
Pemerintah Kota Solok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	57	0	5	68	181	2	12	0	0
Pemerintah Kota Padang	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	55	296	1	13	589	2.319	10	63	0	0
Pemerintah Kota Payakumbuh	0	0	0	0	14	4	0	0	0	0	54	94	0	1	89	348	14	34	0	0
Pemerintah Kota Pariaman	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	32	111	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	448	94	0	0	1	0	669	3.313	35	292	5.625	19.664	208	794	0	0

c) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	40	14	13	800	1.250	7	22	0	0

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Kab. Bintan	0	0	0	0	21	3	0	0	0	0	23	123	1	6	142	446	7	22	0	0
Pemerintah Kab. Karimun	0	0	0	0	34	5	0	0	0	0	25	63	3	2	432	845	4	14	0	0
Pemerintah Kab. Natuna	0	0	0	0	25	7	0	0	0	0	50	216	2	10	174	360	24	38	0	0
Pemerintah Kab. Lingga	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	36	172	0	4	107	238	13	20	0	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	0	0	0	0	39	5	0	0	0	0	12	91	1	5	163	341	6	10	0	0
Pemerintah Kota Batam	0	0	0	0	66	6	0	0	0	0	105	408	18	39	1.060	2.040	40	98	0	0
Pemerintah Kota Tanjungpinang	0	0	0	0	62	14	0	0	0	0	35	110	0	4	212	510	5	42	0	0
TOTAL	0	0	0	0	261	40	0	0	0	0	300	1.223	39	83	3.090	6.030	106	266	0	0

9. Jumlah PNS Jabatan Fungsional Tertentu

INSTANSI	JFT GURU	JFT NAKES	JFT TEKNIS	TOTAL
Pemerintah Provinsi Riau	5.794	1.123	1.332	8.249
Pemerintah Kab. Kampar	3.379	1.245	440	5.064
Pemerintah Kab. Bengkalis	2.536	953	326	3.815
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	1.855	780	238	2.873
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	2.832	941	430	4.203
Pemerintah Kab. Pelalawan	1.792	634	406	2.832
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	2.325	758	371	3.454
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	2.529	881	311	3.721
Pemerintah Kab. Siak	2.030	868	314	3.212
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	1.924	972	402	3.298
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	1.047	371	118	1.536
Pemerintah Kota Pekanbaru	2.448	991	463	3.902
Pemerintah Kota Dumai	1.339	684	386	2.409
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	8.756	1.548	1.046	11.350
Pemerintah Kab. Agam	2.686	919	369	3.974
Pemerintah Kab. Pasaman	1.556	663	262	2.481
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	2.659	1.049	622	4.330
Pemerintah Kab. Solok	2.463	725	404	3.592
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	2.687	1.010	319	4.016
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	2.768	1.016	331	4.115
Pemerintah Kab. Tanah Datar	2.045	812	322	3.179
Pemerintah Kab. Sijunjung	1.560	531	250	2.341
Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	765	335	208	1.308
Pemerintah Kab. Solok Selatan	1.437	556	200	2.193
Pemerintah Kab. Dharmasraya	1.389	692	260	2.341
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	2.104	770	319	3.193
Pemerintah Kota Bukittinggi	591	309	252	1.152
Pemerintah Kota Padang Panjang	415	409	208	1.032
Pemerintah Kota Sawahlunto	541	412	218	1.171
Pemerintah Kota Solok	504	282	304	1.090
Pemerintah Kota Padang	3.068	1.219	574	4.861
Pemerintah Kota Payakumbuh	725	556	285	1.566
Pemerintah Kota Pariaman	747	539	252	1.538
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	1.791	440	808	3.039
Pemerintah Kab. Bintan	950	576	347	1.873
Pemerintah Kab. Karimun	1.205	626	367	2.198
Pemerintah Kab. Natuna	719	435	414	1.568
Pemerintah Kab. Lingga	1.040	413	208	1.661
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	465	348	161	974
Pemerintah Kota Batam	1.920	889	510	3.319
Pemerintah Kota Tanjungpinang	764	432	448	1.644
TOTAL	80.150	29.712	15.805	125.667

10. Jumlah PPPK Jabatan Fungsional Tertentu

INSTANSI	JFT GURU	JFT NAKES	JFT TEKNIS	TOTAL
Pemerintah Provinsi Riau	8.429	140	372	8.941
Pemerintah Kab. Kampar	3.659	189	154	4.002
Pemerintah Kab. Bengkalis	2.568	647	321	3.536
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	2.136	220	99	2.455
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	2.034	31	65	2.130
Pemerintah Kab. Pelalawan	1.276	80	20	1.376
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	2.495	584	345	3.424
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	2.160	450	464	3.074
Pemerintah Kab. Siak	1.861	308	574	2.743
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	1.452	202	53	1.707
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	670	70	286	1.026
Pemerintah Kota Pekanbaru	1.222	27	140	1.389
Pemerintah Kota Dumai	993	495	93	1.581
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3.869	83	526	4.478
Pemerintah Kab. Agam	2.014	202	282	2.498
Pemerintah Kab. Pasaman	1.475	238	316	2.029
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	1.320	7	325	1.652
Pemerintah Kab. Solok	935	0	40	975
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	1.503	0	340	1.843
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	2.813	824	79	3.716
Pemerintah Kab. Tanah Datar	1.277	166	196	1.639
Pemerintah Kab. Sijunjung	1.086	301	150	1.537
Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	618	358	40	1.016
Pemerintah Kab. Solok Selatan	257	0	29	286
Pemerintah Kab. Dharmasraya	973	223	393	1.589
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	1.473	295	49	1.817
Pemerintah Kota Bukittinggi	262	93	153	508
Pemerintah Kota Padang Panjang	93	8	161	262
Pemerintah Kota Sawahlunto	206	97	504	807
Pemerintah Kota Solok	244	88	2	334
Pemerintah Kota Padang	2.850	375	133	3.358
Pemerintah Kota Payakumbuh	362	39	251	652
Pemerintah Kota Pariaman	133	0	14	147
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2.051	28	81	2.160
Pemerintah Kab. Bintan	578	114	102	794
Pemerintah Kab. Karimun	948	27	452	1.427
Pemerintah Kab. Natuna	416	93	397	906
Pemerintah Kab. Lingga	313	277	14	604
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	398	30	245	673
Pemerintah Kota Batam	2.592	161	1.127	3.880
Pemerintah Kota Tanjungpinang	544	144	306	994
TOTAL	62.558	7.714	9.693	79.965

11. Jumlah PNS Jabatan Fungsional Tertentu Tenaga Kesehatan

No.	KATEGORI	JABATAN	PNS	PPPK	TOTAL
1	Ahli Medis (Utama, Madya, Muda, dan Pertama)	Apoteker	706	215	921
2		Dokter Gigi	867	56	923
3		Dokter	2.991	435	3.426
4		Dokter Pendidik	20	0	20
5	Tenaga Kesehatan Keahlian (Madya, Muda, dan Pertama)	Administrator Kesehatan	640	343	983
6		Pembimbing Kesehatan	42	53	95
7		Fisikawan Medis	12	3	15
8		Asisten Penata Anestesi	58	15	73
9		Penata Anestesi	19	17	36
10		Psikolog Klinis	22	5	27
11	Tenaga Kesehatan Keterampilan (Penyelia, Mahir, dan Terampil)	Asisten Apoteker	1.154	209	1.363
12		Okupasi Terapis	11	1	12
13		Ortotik Prostetis	2	0	2
14		Refraksionis Optisien	91	34	125
15		Teknisi Gigi	3	1	4
16		Teknisi Transfusi Darah	16	5	21
17		Terapis Wicara	11	2	13
18	Tenaga Kesehatan Keahlian dan Keterampilan	Bidan	8.604	2.060	10.664
19		Entomolog Kesehatan	5	4	9
20		Epidemiolog Kesehatan	187	93	280
21		Fisioterapis	227	67	294
22		Nutrisionis	931	274	1.205
23		Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku / Penyuluh Kesehatan Masyarakat	582	299	881
24		Perawat	9.013	2.574	11.587
25		Terapis Gigi dan Mulut / Perawat Gigi	642	63	705
26		Perekam Medis	612	249	861
27		Pranata Laboratorium Kesehatan	1.169	311	1.480
28		Radiografer	273	64	337
29		Tenaga Sanitasi Lingkungan / Sanitarian	690	231	921
30		Teknis Elektromedis	112	31	143
TOTAL			29.712	7.714	37.426

No.	KATEGORI	JABATAN	PNS	PPPK	TOTAL
1	Ahli Medis (Utama, Madya, Muda, dan Pertama)	Apoteker	706	215	921
2		Dokter Gigi	867	56	923
3		Dokter	2.991	435	3.426
4		Dokter Pendidik	20	0	20
5	Tenaga Kesehatan Keahlian (Madya, Muda, dan Pertama)	Administrator Kesehatan	640	343	983
6		Pembimbing Kesehatan	42	53	95
7		Fisikawan Medis	12	3	15
8		Asisten Penata Anestesi	58	15	73
9		Penata Anestesi	19	17	36
10		Psikolog Klinis	22	5	27
11	Tenaga Kesehatan Keterampilan (Penyelia, Mahir, dan Terampil)	Asisten Apoteker	1.154	209	1.363
12		Okupasi Terapis	11	1	12
13		Ortotik Prostetis	2	0	2
14		Refraksionis Optisien	91	34	125
15		Teknisi Gigi	3	1	4
16		Teknisi Transfusi Darah	16	5	21
17		Terapis Wicara	11	2	13
18	Tenaga Kesehatan Keahlian dan Keterampilan	Bidan	8.604	2.060	10.664
19		Entomolog Kesehatan	5	4	9
20		Epidemiolog Kesehatan	187	93	280
21		Fisioterapis	227	67	294
22		Nutrisionis	931	274	1.205
23		Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku / Penyuluh Kesehatan Masyarakat	582	299	881
24		Perawat	9.013	2.574	11.587
25		Terapis Gigi dan Mulut / Perawat Gigi	642	63	705
26		Perekam Medis	612	249	861
27		Pranata Laboratorium Kesehatan	1.169	311	1.480
28		Radiografer	273	64	337
29		Tenaga Sanitasi Lingkungan / Sanitarian	690	231	921
30		Teknis Elektromedis	112	31	143
TOTAL			29.712	7.714	37.426